

Peran Gerakan Pemuda Ansor dalam Penguatan *Civil Society* di Kabupaten Jepara

Oleh:

Sabat Banuaji, Dra. Wiwik Widayati, Dra. Puji Astuti, M. Si

Abstraksi

Demokrasi yang kuat dan sehat tidak hanya membutuhkan dunia politik (*political society*) yang kuat. Tentu saja, penting memiliki partai yang kuat, pemimpin yang kuat, dan pemerintahan yang kuat. Namun, demokrasi juga membutuhkan dunia masyarakat (*civil society*) yang juga sehat dan kuat. Sebagai salah satu penyangga kekuatan *civil society* Meski hasilnya belum seimbang sesuai dengan harapan publik. Potensi serta modal sosial jika dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh GP Ansor tentu akan memiliki dampak yang amat besar bagi perkembangan kehidupan, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya serta politik dalam tubuh Ansor maupun masyarakat secara luas sehingga mampu menjadi penggerak dalam penguatan *civil society* di Indonesia khususnya di Jepara. Tidak dapat dipungkiri keberadaan GP Ansor selama ini terkesan begitu kental dengan aroma politik. Hal ini memang karena aktivis Ansor banyak terlibat di ranah politik. Aktivis GP Ansor lebih tertarik menjadi politisi ketimbang sebagai penyangga gerakan *civil society*. Sayangnya, naluri politik tersebut belum berkorelasi positif terhadap usaha-usaha GP Ansor dalam turut memberikan pemahaman dalam membangun iklim demokrasi pada masyarakat.

Kata kunci: Demokrasi, *Civil Society*, Modal Sosial

I. Pendahuluan

Demokrasi merupakan sebuah konsep yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai sebagai faktor utama dalam proses penyelenggaraan negara, dimana didalamnya terkandung nilai-nilai dasar antara lain: adanya persamaan, hormat terhadap nilai-nilai luhur manusia, hormat terhadap hak-hak sipil dan kebebasan, serta *fair play*¹. Kedaulatan rakyat tersebut termanifestasikan melalui partisipasi politik warga yang berlangsung secara terus-menerus, atau dengan kata lain partisipasi politik rakyat tersebut tidak boleh berhenti setelah memberikan

¹ Lihat Rafael Raga Maran. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Rneka Cipta. Hlm. 203-205

suara (dalam pemilu). Rakyat harus aktif mengawasi dan terlibat dalam proses politik secara terus menerus².

Demokrasi yang kuat dan sehat tidak hanya membutuhkan dunia politik (*political society*) yang kuat. Tentu saja, penting memiliki partai yang kuat, pemimpin yang kuat, dan pemerintahan yang kuat. Namun, demokrasi juga membutuhkan dunia masyarakat (*civil society*) yang juga sehat dan kuat. *Civil society*³ diperlukan, *pertama* untuk memberikan jembatan atas proteksi masyarakat dari intervensi negara dan militer yang berlebihan. *Kedua*, *civil society* diperlukan untuk menjembatani kemungkinan terjadinya dominasi oleh kekuatan primordial seperti agama⁴.

Jika kita analogikan, antara demokrasi dan *civil society* bagaikan dua sisi mata uang, keduanya memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Jika dalam suatu negara terdapat *civil society* yang kuat, maka demokrasi pun akan menjadi baik. Begitu juga sebaliknya, jika *civil society* di suatu negara itu buruk, maka demokrasi akan berjalan lamban.

Civil society di Indonesia sendiri mulai menampakkan kemunculannya ketika terjadi proses formasi sosial baru dalam masyarakat kolonial menyusul diperkenalkannya sistem ekonomi kapitalis dan birokrasi modern. Tentu saja embrio *civil society* telah ada sebelumnya, yaitu keberadaan lembaga-lembaga masyarakat yang kurang lebih bersifat mandiri, seperti lembaga pendidikan pesantren, misalnya. Namun, perkembangan *civil society* yang mampu mengambil jarak terhadap negara dan mencoba melakukan fungsi dan peran penyeimbang baru terjadi pada awal abad ke duapuluh, manakala ormas-ormas modern terbentuk. Kelas menengah baru, khususnya dari kalangan pribumi yang kemudian menjadi motor gerakan-gerakan sosial dan politik kolonial dapat disebut sebagai aktor utama *civil society* modern di negeri ini dalam pengertian yang sebenarnya.

² Lihat J Kristiadi. “*Demokrasi Tiwul*”. Analisis Politik. Kompas, 11 Januari 2011

³ Istilah *civil society* juga sering disebut “masyarakat madani” (Anwar Ibrahim, 1996, Nurcholish Madjid, Dawam Raharjo, 1997), “masyarakat sipil” (Mansour Fakih, 1996), ataupun “masyarakat kewargaan” (Ryaas Rasyid, Frans Maginis Suseno, 1997)

⁴ Muhammad A. S Hikam. 2000. *Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society*. Jakarta: Erlangga. Hlm. 81

Gerakan Pemuda Ansor merupakan sebuah gerakan yang dimotori oleh pemuda-pemuda NU yang diharapkan menjadi pemimpin-pemimpin baik dalam tubuh NU maupun dalam lingkup nasional kelak dikemudian hari. Sebagai salah satu kekuatan *civil society*, dalam skala nasional Ansor telah melakukan banyak hal dalam upaya penguatan masyarakat sipil. Mulai dari penguatan kultur demokrasi, sampai pada upaya pemberdayaan masyarakat. Meski hasilnya belum seimbang sesuai dengan harapan publik. Potensi serta modal sosial tersebut jika dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh GP Ansor tentu akan memiliki dampak yang amat besar bagi perkembangan kehidupan, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya serta politik dalam tubuh Ansor maupun masyarakat secara luas sehingga mampu menjadi penggerak dalam penguatan *civil society* di Indonesia khususnya di Jepara yang menjadi lokus dalam tulisan ini.

II. Pembahasan

Kiprah GP Ansor dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah tidak terbantahkan. GP Ansor memang lahir untuk diproyeksikan sebagai wadah berkiprah dan pengabdian secara konkret, baik kepada agama, negara, alim ulama, pesantren, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai *Ahlussunnah wal jamaah*. Inilah yang membedakan GP Ansor dengan organisasi-organisasi kepemudaan lainnya. Gerakan Pemuda Ansor berasaskan Pancasila, yakni keTuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. GP Ansor sesuai peraturan dasarnya bertujuan antara lain:

- a. Membentuk dan mengembangkan generasi muda Indonesia sebagai kader bangsa yang tangguh, memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, berkepribadian luhur, berakhlak mulia, sehat terampil, patriotik, ikhlas dan beramal shalih.
- b. Menegakkan ajaran islam *Ahlussunnah Wal Jamaah* dengan menempuh *manhaj* salah satu madzhab empat di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

- c. Berperan secara aktif dan kritis dalam pembangunan nasional demi terwujudnya cita-cita kemerdekaan Indonesia yang berkeadilan, kemakmuran, berkemanusiaan dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia yang diridloi Allah SWT.

Dalam analisis Machrus Irsyam (1981; 37-39), terdapat tiga pilar utama kekuatan politik yang dimiliki GP Ansor termasuk dalam hal ini NU, yaitu⁵; *pertama*, basis massa (struktur sosial) yang bertumpu pada massa pondok pesantren yang berada di pedesaan. *Kedua*, Basis ulama-politisi yang digambarkan memiliki konsistensi gerakan karena berfungsinya dua struktur yang saling melengkapi, struktur formal yang diatur secara organisatoris dan struktur non formal yang tumbuh dari interaksi antara ulama dan politisi dan *ketiga*, tradisi yang dimanifestasikan dalam pola hubungan ulama-politisi-massa menjadi tradisi yang dianut secara teguh.

Sebagai organisasi kader yang diharapkan mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin masa depan yang unggul, upaya meningkatkan kualitas kader-kader merupakan salah satu tugas utama organisasi ini. PC GP Ansor Jepara sendiri melalui Departemen Pendidikan dan Kaderisasi yang telah melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

1. Menyelenggarakan Lokakarya Pendidikan

Kegiatan ini dilaksanakan guna memberikan evaluasi penyelenggaraan sistem ujian nasional ataupun implementasi sistem pendidikan di Kabupaten Jepara. Menghadirkan para akademisi dari tingkat SLTP dan SLTA, Komite Sekolah, Dinas terkait dan Dewan Pendidikan Daerah serta orang tua/wali siswa dan para siswa sendiri sebagai pelaku sistem ini.

2. Menyelenggarakan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) GP. Ansor

LKD ini diselenggarakan oleh PC. GP. Ansor dengan peserta dari PAC-PAC se Kabupaten Jepara. Kegiatan LKD merupakan kegiatan wajib

⁵ M. B. Idham Chalid. *Menguatkan Gerakan Civil Society*. <http://gp-ansor.org/2397-20042007.html> diakses pada tgl 2 Februari 2011 Pkl 16.00 WIB

dimana untuk tingkat cabang, LDK dilaksanakan dua kali dalam satu periode kepengurusan. Sedangkan dalam lingkup anak cabang, cukup satu kali dalam satu periode kepengurusan.

3. Menyelenggarakan Diklatsar Banser

Sesuai dengan peraturan organisasi Banser bahwa diklatsar Banser sebagai palang pintu masuk sebagai anggota Banser. Dan posisi Banser sebagai kader inti GP. Ansor menjadikan pelatihan ini sebagai prioritas kegiatan yang dilaksanakan oleh departemen terkait. Kegiatan ini tidak lepas dari partisipasi aktif Satkorcab Banser sebagai organisasi semi otonom GP. Ansor.

Diklatsar Banser akan diikuti oleh seluruh anggota Banser di Kabupaten Jepara baik yang baru maupun yang belum pernah mengikuti diklatsar. Sebagai pengesahan dan menjadi kebanggaan anggota, maka sangat perlu diterbitkannya piagam dan penyematan wing diklatsar Banser dalam bentuk upacara kebanseran.

Selain itu, guna menghadapi tantangan dalam era informasi sekarang ini, PC GP Ansor Jepara melalui Departemen Informasi, IPTEK dan Kajian Strategis-nya telah merealisasikan beberapa program sebagai berikut:

1. Menerbitkan situs internet www.ansorjepara.com

Berkaitan dengan kebutuhan akan informasi dan komunikasi maka pengemasan dalam bentuk teknologi informasi berupa internet sangat dibutuhkan. Lewat situs ini jaringan informasi dan komunikasi dapat dibangun sampai ke pelosok ranting di Kabupaten Jepara secara cepat, mudah dan murah.

2. Membentuk Lembaga Kajian Strategis

Lembaga ini diharapkan tidak overlaping dengan kegiatan departemen dan outputnya berupa rekomendasi ke berbagai pihak sesuai dengan materi kajian yang tidak jauh dari permasalahan-permasalahan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

3. Menyelenggarakan Pelatihan Hemat Energi

Krisis energi yang melanda dunia tak terkecuali Indonesia berimbas luar biasa bagi kenaikan harga. Masyarakat semakin tertekan secara ekonomi. Untuk itu adanya penggunaan bahan bakar yang hemat sangat diperlukan dan ini membutuhkan solusi yang keluar dari pikiran-pikiran hebat para pakar untuk bisa ditularkan kepada masyarakat.

Dalam bidang ekonomi yang menjadi program kerja GP Ansor Kabupaten Jepara antara:

1. Melanjutkan kegiatan Arisan Karisma

Kegiatan ini dilaksanakan guna memberikan income bagi kas Ansor. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada periode sebelumnya dan pada periode ini dilanjutkan lagi.

2. Membentuk koperasi simpan pinjam

Koperasi dimaksud untuk memberikan modal usaha bagi khususnya warga GP. Ansor umumnya kepada masyarakat Jepara. Selain itu juga memberikan kontribusi terhadap kas Ansor yang tidak sedikit.

3. Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan

Bekerja sama dengan BLK (Balai Latihan Kerja) maupun para praktisi ekonomi di Jepara guna memberikan pelatihan mengenai entrepreneurship di kalangan warga GP. Ansor.

Pengurus Pimpinan cabang GP Ansor melalui beberapa departemennya juga mempunyai dan telah merealisasikan beberapa program yang berkaitan dengan sosial kebudayaan antara lain sebagai berikut:

1. Departemen Olahraga dan Kebudayaan

Bentuk Program :

- a. Menyelenggarakan event olahraga bagi warga GP. Ansor dan masyarakat
- b. Menyelenggarakan kerja sama di bidang olah raga dengan organisasi kepemudaan di tingkat kabupaten
- c. Menyelenggarakan event kesenian dan kebudayaan yang islami bagi warga GP. Ansor dan masyarakat.

Realisasi program :

- a. Turnamen bola voli

Bekerja sama dengan sponsor untuk pelaksanaan kegiatan ini. Turnamen ini diselenggarakan antar klub di Kabupaten Jepara dan bertepatan dengan moment penting dalam organisasi, misalnya dalam rangka Harlah Ansor. Kegiatan ini telah berlangsung di beberapa desa, seperti di Desa Wonorejo, Desa Ngeling dan Desa Telukwetan

b. Menyelenggarakan Festival Budaya Islam Jepara

Dimaksudkan untuk melestarikan budaya-budaya Islam di Kab. Jepara bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait (DKD, Lesbumi, seniman-seniman dan pelaku budaya Jepara).

2. Departemen Agama dan Ideologi

Bentuk Program :

- a. Mengadakan kegiatan peningkatan kesadaran dan pengamalan ajaran Ahlussunah Wal jamaah melalui pengajian, diskusi, seminar, siaran radio, dialog, ziarah dan silaturrohim.
- b. Mengadakan PHBI dan PHBN
- c. Mengadakan perkemahan pemuda untuk kesatuan bangsa

Realisasi program :

a. Menyelenggarakan kajian kitab salaf

Penerapan hukum-hukum dan aturan-aturan Islam dalam dinamika kehidupan masyarakat memerlukan pemikiran dan solusi yang tepat karena selama ini ditemui penyimpangan yang diakibatkan ketidakfahaman terhadap pelaksanaan hukum dan aturan itu. Dengan menghadirkan pakar di bidangnya, diharapkan kajian ini dapat menghasilkan solusi dari permasalahan yang dialami oleh khususnya warga GP. Ansor.

Kegiatan ini bekerja sama dengan radio Erlisa Jepara sehingga syiarnya dapat digaungkan lebih luas.

b. Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)

Diperlukan penjadwalan terhadap kegiatan ini karena adanya beberapa hari besar Islam yang dapat diperingati dalam satu tahun. Diharapkan

tidak monoton sehingga dapat diikuti oleh banyak warga khususnya anggota GP. Ansor.

c. Menyelenggarakan Kemah Ta'aruf

Nilai-nilai kesatuan bangsa dapat dibentuk salah satunya melalui kebersamaan dalam pengabdian masyarakat. Dengan kemah ta'aruf yang diikuti oleh anggota GP. Ansor Kab. Jepara diharapkan mampu memberikan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan fungsi kemaslahatannya.

Civil society seringkali dipandang sebagai kunci untuk mencapai demokrasi dan membuat demokrasi sukses. Sayangnya, *civil society* merupakan konsep yang ambigu. Ia mengacu pada sedikitnya dua situasi dan kondisi yang berlainan. Dalam situasi dan kondisi yang pertama, lembaga-lembaga sosial yang kuat dan mempunyai akar yang mendalam dalam masyarakat mampu melawan kontrol rezim-rezim otoriter. Dalam kasus kedua, ada jaringan organisasi-organisasi sosial yang rapat yang memberikan model atau memberikan sivilitas, kerja sama dan toleransi serta menciptakan hubungan-hubungan antara seksi-seksi masyarakat yang mendorong partisipasi, *civic trust*, dan kerja sama. Inilah yang disebut modal sosial.⁶

Manifestasi-manifestasi dari *civil society* ini sama-sama problematik. Jika masyarakat sipil terdiri dari lembaga-lembaga kuat yang mampu melawan kemauan negara otoriter, apakah lembaga-lembaga tersebut juga mampu mengalahkan proses-proses demokratis dan menelkung proses-proses demokratis? Organisasi-organisasi yang cukup kuat untuk melawan aturan otoriter mungkin juga cukup kuat untuk mendominasi negara-negara lemah dan mengesampingkan penduduk yang lain dari partisipasi dalam atau kemungkinan memperoleh keuntungan dari pemerintahan demokratis. Di pihak lain, jika *civil society* adalah jaringan organisasi-organisasi sosial rapat yang mendorong *civic trust*, dan kerja sama, bagaimana jaringan rapat itu menjadi ada dan bagaimana

⁶ Jim Schiller. *Masyarakat Sipil di Jepara: Mudah Terpecah Tapi Inklusif* dalam Henk Schulte Nordholt dan Gery van Klinken (Eds). (2007). *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hal : 437

modal sosial yang ia ciptakan diterjemahkan menjadi kerja sama dan perintang politis yang diperlukan untuk membuat demokrasi atau pembangunan berjalan.

Jika kita lihat apa yang selama ini telah dilakukan GP Ansor sebagai salah satu kekuatan *civil society* berdasarkan temuan-temuan yang telah dipaparkan di atas, bisa dikatakan GP Ansor di Jepara paling mendekati modal sosial tipe yang kedua, dimana ada jaringan organisasi-organisasi sosial yang rapat yang memberikan model atau memberikan sivilitas, kerja sama dan toleransi serta menciptakan hubungan-hubungan antara seksi-seksi masyarakat yang mendorong partisipasi, *civic trust*, dan kerja sama (meskipun masih dalam lingkup yang terbatas) serta lebih memilih pola-pola komunikasi yang halus dan lebih sering memilih berunding dengan pemerintah untuk bekerja sama.

Dalam rangka pemanfaatan modal sosial ini Putnam melihat dua cara dengan mana modal sosial bisa berfungsi untuk menciptakan *civic trust* dan mendorong partisipasi masyarakat. Secara internal, mereka bisa menanamkan kebiasaan-kebiasaan kerja sama, solidaritas dan semangat publik para anggota mereka. Secara eksternal, mereka bisa menciptakan sebuah model upaya mewujudkan kepentingan diri yang bersifat pencerahan atau setidaknya-tidaknya yang dibatasi secara mandiri. Di bawah kondisi-kondisi yang sama, hal ini bisa menciptakan sebuah jaringan kerja rapat kelompok-kelompok aktivis yang mempunyai kompetensi *civic* (maksudnya, gaya dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan bagi aktivitas politis dan sosial publik) dan empati bagi kelompok-kelompok komunitas lain. Dengan kata lain, ia bisa menciptakan suatu kebudayaan ketika tuntutan-tuntutan dikomunikasikan dan dikendalikan. Dalam iklim seperti itu, para partisipan politik bisa bersikap sebagai pecundang yang baik atau pemenang yang murah hati. Ini menjadi jauh lebih mudah ketika banyak orang menjadi anggota dari aneka macam organisasi, memiliki aneka loyalitas yang terpisah-pisah atau memiliki suatu pandangan dunia yang dibentuk oleh suatu kelompok referensi dengan aneka macam kepentingan.⁷

Dalam memahami GP Ansor bagaimana menjalankan perannya sebagai salah satu kekuatan *civil society* di Jepara, gambaran Putnam di atas setidaknya

⁷ Ibid. Hal: 438

dapat dijadikan rujukan. Secara Internal, GP Ansor relatif mampu menjalin kerjasama dan koordinasi yang cukup baik dengan setiap jajaran kepengurusan dalam setiap kegiatan yang diselenggarakannya. Untuk kasus-kasus tertentu, seperti ketika terjadi banjir beberapa waktu yang lalu yang melanda beberapa daerah di Jepara misalnya, GP Ansor melalui Bansernya cukup responsif dengan turut membantu dan memberikan bantuan. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial keagamaan seperti yasinan, serta kegiatan lomba/atau turnamen olahraga yang digagas oleh kader-kader Ansor pada akhirnya mampu memperkuat modal sosial yang dimilikinya karena adanya kerjasama, dan koordinasi yang intens setiap anggota. Karena seperti telah diketahui bahwa modal sosial justru akan semakin kuat/ bertambah jika sering dipergunakan.

Sedangkan secara eksternal, dengan jaringan serta latar belakang anggota yang beragam, Gp Ansor Jepara mampu mengaktualisasikan kepentingan-kepentingannya secara simpatik dan cenderung kulturalif. Istigotsah-istighotsah yang sering diadakan ketika menghadapi momen-momen khusus seperti pilkada misalnya atau yang cukup fenomenal yaitu ketika mengadakan istighotsah fukushima yang ditujukan untuk menolak dibangunnya pembangkit listrik tenaga nuklir di Jepara pada akhirnya mampu berdampak positif sesuai yang diharapkan GP Ansor. Menurut hemat penulis, pendekatan persuasif, dialogis dan kultural yang ditempuh GP Ansor dalam menyatakan aspirasi politiknya membuat gagasan-gagasan yang disuarakan lebih bisa diterima secara luas.

Dari sana dapat kita pahami bahwa GP Ansor sebagai salah satu kekuatan *civil society* telah mendekati apa yang digambarkan oleh Alexis de Tocqueville. Menurut Tocqueville, posisi *civil society* tidak apriori subordinatif terhadap negara. Dalam pemahaman Tocquevillean, *civil society* di dalam dirinya memiliki kekuatan politis yang dapat mengekang atau mengontrol kekuatan intervensionis negara. Tocqueville juga menekankan adanya dimensi kultural yang membuat *civil society* dapat berperan sebagai kekuatan penyeimbang, yakni keterkaitan dan semangat kepatuhan terhadap norma-norma dan nilai hukum yang diikuti oleh warganya.

Terkait hubungannya dengan penguatan *civil society*, parameter yang diajukan Ryaas Rasyid bisa dijadikan rujukan. Menurutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya *civil society* menurutnya ada tiga, yakni⁸: *pertama*, baiknya sektor ekonomi, sehingga masyarakat tidak tergantung pemerintah. *Kedua*, perkembangan intelektualitas yang menumbuhkan komitmen masyarakat untuk independen. *Ketiga*, pergeseran dari kultur paternalistik menjadi kultur yang lebih modern dan independen.

Dari ketiga faktor tersebut diatas, faktor pertama dan ketiga yaitu faktor ekonomi dan penciptaan kultur yang independenlah yang cukup menonjol dimainkan oleh Ansor. Program-program di bidang ekonomi yang cukup serius digalakkan melalui arisan-arisan dan koperasi yang meskipun belum teridentifikasi lebih lanjut sejauh mana program-program tersebut mampu berdampak signifikan dan menjangkau secara luas kehidupan perekonomian anggotanya, namun tetap patut diapresiasi ditengah kehidupan perekonomian masyarakat Jepara secara umum yang sedang lesu.

III. Penutup

Tidak dapat dipungkiri keberadaan GP Ansor selama ini terkesan begitu kental dengan aroma politik. Hal ini memang karena aktivis Ansor banyak terlibat di ranah politik. Aktivis GP Ansor lebih tertarik menjadi politisi ketimbang sebagai penyangga gerakan *civil society*. Sayangnya, naluri politik tersebut belum berkorelasi positif terhadap usaha-usaha GP Ansor dalam turut memberikan pemahaman dalam membangun iklim demokrasi pada masyarakat. Selama ini belum ada kegiatan yang sifatnya memberikan pemahaman tentang kewarganegaraan dan kebangsaan. Sebaliknya, kegiatan yang dilakukan selama ini masih banyak yang bersifat ritual-ritual keagamaan seperti pengajian dan sebagainya. Menghadapi realitas kebangsaan dengan problem yang sangat kompleks, tentu membutuhkan adanya kedewasaan politik, bukan hanya kearifan

⁸ Ahmad Najib Burhani. (2001). *Islam Dinamis, Menggugat Peran Agama Membongkar Doktrin yang Membatu*. Jakarta: KOMPAS. Hal: 160

politik dengan sikap arif dan bijaksana mengahapi kompleksitas problem kebangsaan, akan tetapi GP Ansor dituntut perannya secara riil untuk lebih mengedepankan kepentingan rakyat diatas kepentingan kelompok atau golongan. Tidak ada jalan lain bagi GP Ansor agar tidak ditinggalkan warganya, perlu strategi yang lebih kreatif dan aspiratif dalam ikut membantu pemerintah meringankan beban masyarakat.

Jika kita kaitkan antara *civil society* dengan pengembangan kultur demokrasi, bagaimanapun GP Ansor harus lebih aktif dalam proyek-proyek membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kewaganegaraan. Upaya ini setidaknya bisa dimulai dengan meningkatkan kualitas kader-kader GP Ansor melalui kegiatan-kegiatan yang menunjang. Mengingat perkembangan politik, baik di tingkat nasional maupun lokal, agenda penguatan kultur demokrasi ini menjadi kian mendesak dilakukan oleh organisasi-orgasnisi *civil society* termasuk GP Ansor, mengingat janji-janji reformasi sampai saat ini belum membuahkan hasil, dan bahkan membuat masyarakat menjadi semakin antipati. Demokrasi yang didengung-dengungkan selama ini hanya sebatas formalitas, belum sampai pada substansi.

IV. Daftar Pustaka

- Burhani, Ahmad Najib. (2001). *Islam Dinamis, Menggugat Peran Agama Membongkar Doktrin yang Membatu*. Jakarta: KOMPAS
- Hikam, Muhammad A. S. 2000. *Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society*. Jakarta: Erlangga
- Maran, Rafael Raga. (2007). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Rneka Cipta
- Nordholt, Henk Schulte dan Gery van Klinken (Eds). (2007). *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- J Kristiadi. “*Demokrasi Tiwul*”. Analisis Politik. Kompas, 11 Januari 2011
- Chalid. M. B. Idham. *Menguatkan Gerakan Civil Society*. <http://gp-ansor.org/2397-20042007.html> diakses pada tgl 2 Februari 2011 Pkl 16.00 WIB

